

Kebijakan Dalam Menyikapi Sastra Jawa Modern Sebagai Sumber Kearifan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Generasi Muda

Oleh: Drs. Afendy Widayat, M.Phil. (UNY)

Abstrak

Di era modern ini, generasi muda semakin menjauh dari berbagai idealisme kehidupan masyarakat Jawa. Generasi muda lebih tertarik dan melaksanakan nilai-nilai kehidupan dari pengaruh carut-marut modernisasi, yang secara umum dapat dikategorikan negatif, tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan masyarakat Jawa. Generasi muda juga enggan melongok isi nilai-nilai budaya Jawa seperti yang terdapat dalam karya sastra Jawa.

Karya sastra, pada kenyataannya tidak terlepas dari situasi sosial budaya masyarakatnya, terutama masyarakat di era diciptakannya karya tersebut. Kenyataan ini telah melahirkan karya-karya sastra Jawa modern, dengan berbagai pemikiran tema dan amanatnya. Secara sosiologi sastra, karya sastra Jawa modern menjadi sumber kearifan yang ditawarkan pada masyarakat termasuk pada generasi muda.

Berbagai karya sastra Jawa modern, baik yang berupa puisi, prosa, maupun drama Jawa modern, banyak berisi cerita kehidupan modern, yang relatif negatif, yang oleh pengarang telah disikapi secara kritis dengan menengahkan amanat dengan kearifan lokal nilai-nilai budaya Jawa. Sastra Jawa modern sebagai sumber kearifan dalam bermasyarakat bagi generasi muda perlu ditekankan dengan melalui berbagai kebijakan, seperti pada jalur pembelajaran sastra Jawa di sekolah, lomba apresiasi sastra Jawa bagi generasi muda secara umum, lomba menulis sinopsis atau resensi sastra Jawa bagi generasi muda secara umum, lomba membaca cerkak, dan sebagainya. Berbagai kebijakan harus sengaja ditekankan oleh instansi-instansi terkait, seperti dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dan sebagainya, bila perlu instansi lain di pemda harus ikut dilibatkan demi keterbacaan sastra Jawa sebagai sumber kearifan bagi generasi muda.

A. Pendahuluan

Setiap budaya sedikit atau banyak memiliki kekhasannya sendiri yang sering kali sekaligus menjadi ikon kebanggaan masyarakat pendukungnya. Ikon kebanggaan ini sering dikemas dalam kebahasaan tertentu yang dalam

budaya Indonesia sering disebutkan sebagai jati diri bangsa. Meskipun tidak sangat jelas seperti apa dan bagaimana wujud dan sifat dasarnya, jati diri telah ditetapkan sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Budaya Jawa sebagai bagian dari budaya Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat pendukung yang signifikan, setidaknya memiliki kemasan budaya yang dinilai adi luhung, dan sebagiannya telah diakui di tingkat dunia, seperti halnya wayang purwa, batik, keris, dan sebagainya, yang di dalamnya tercermin kompleksitas wujud budaya, mulai dari budaya fisiknya, system kemasyarakatannya hingga pada tataran yang terdalam, yakni menyangkut system idiologi yang mendasarinya.

Bagi sebagian masyarakat Jawa yang masih merasa memiliki (*handarbeni*), yakni sebagai pemilik dan pendukung budaya Jawa secara umum, berbagai khasanah budaya di dalamnya tentu akan diusahakan untuk dipertahankan (*diupi-upi dimen lestari*). Namun demikian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jumlah (kuantitas) sebagian masyarakat Jawa yang demikian ini, dan seberapa jauh usaha yang dilakukan (kualitas) dalam rangka ikut *gumregut cancut taliwanda* mengupayakan pemertahanan budaya itu?

Dewasa ini arah gerak budaya di setiap sudut dunia, mau tidak mau telah terseret oleh lajunya globalisasi atau lajunya keterbukaan informasi, tidak terkecuali pada masyarakat dan budaya Jawa. Tarik ulur antara budaya-budaya besar, seperti modernisasi ala Barat, pembudayaan menurut agama-agama besar, atau riak-riak adat ketimuran tertentu, lambat laun mulai menggelindingkan bola globalisasi itu menuju masa depan yang menyatu-budaya. Boleh jadi kesatuan budaya itu merupakan hasil akulturasi yang padu, namun juga tidak tertutup kemungkinan hanya berupa mozaik-mozaik yang tetap akan tampak unsur-unsur masing-masing budaya induknya. Pertanyaan selanjutnya, akankah budaya Jawa ikut berperan secara signifikan di dalam carut-marut lajunya globalisasi itu? Tulisan ini tentu tidak akan membicarakan kompleksitas pengaruh budaya pada lajunya budaya global, karena keterbatasan berbagai halnya. Tulisan ini hanya akan membicarakan setetes air di lautan budaya, khususnya masalah kearifan budaya Jawa yang telah ada dan mungkin ada atau mungkin diadakan dalam karya sastra Jawa modern serta berbagai kebijakan yang semestinya dapat dipatokkan sebagai ancangan kehidupan bermasyarakat bagi generasi muda, dengan harapan agar generasi muda tidak kehilangan arah dan tetap dapat meyakini ke-*adiluhung*-an kebudayaan Jawa di tengah-tengah pergaulan budaya global.

B. Karya Sastra Jawa sebagai Sarana Komunikasi Nilai Kejawaan

Karya sastra, secara umum sejak lama telah diketahui sebagai *dulce et utile* (Horatius), yakni sumber hiburan (atau tontonan) sekaligus sumber kemanfaatan (tuntunan). Secara etimologis saja sastra berarti alat untuk mengajar, dengan demikian tentu tidak berbeda jauh bila karya sastra Jawa dapat secara tegar berdiri di tengah-tengah masyarakat. Secara sosiologi sastra, karya sastra tidak hadir dalam kekosongan sosial budaya. Karya sastra selalu berhubungan dengan masyarakatnya, baik pada masyarakat penulisnya, masyarakat imajiner dalam karya sastra yang bersangkutan, maupun masyarakat pembacanya. Tentu saja, dalam tulisan ini yang lebih harus disadari adalah bahwa karya sastra Jawa harus mampu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, atau dengan kata lain mampu secara lebih aktif mewarnai setiap kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat pembacanya. Karya sastra Jawa, secara ideal harus lebih dapat dibaca dan diapresiasi oleh masyarakat, jadi secara material harus lebih mudah didapat dan secara formal harus banyak dan lebih banyak lagi pembaca yang mengapresiasinya.

Karya sastra Jawa secara umum bercirikan pada penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya, di samping juga berisi tentang berbagai budaya Jawa dan masyarakatnya. Kecuali karya-karya saduran atau terjemahan dari karya sastra asing (luar Jawa), karya sastra Jawa secara umum akan diwarnai oleh filsafat atau pandangan hidup Jawa. Dengan kata lain sastra Jawa sadar atau tidak, telah terbingkai oleh pandangan filosofis idiologis Jawa (Widayat, 2011: 25). Seandainya pun, karya sastra selalu berada pada ketegangan antara aturan dan kebebasan atau antara konvensi dan pemberontakan terhadap konvensi (inovasi), seperti yang dinyatakan oleh A.Teeuw (1984: 101), namun apa yang dikomunikasikan sastra Jawa yang bersangkutan, juga dalam bingkai konvensi yang ada. Dengan demikian keberterimaan pada segala pemberontakan terhadap konvensi yang ada, masih berada pada kebebasan sidang pembaca.

Pada kenyataannya, sastrawan-sastrawan Jawa, yakni yang masih mau menulis karya sastra dengan bahasa Jawa, merupakan kelompok masyarakat yang secara umum masih mempertahankan (*nggondheli*) kebudayaan Jawa, yakni nilai-nilai kejawaan yang dinilai *adi luhung*, atau nilai-nilai keluhuran, terutama dalam hal ini nilai-nilai etika Jawa. Nilai etika yang di dalamnya mencakup nilai baik dan tidak baik, secara umum masih mendarah daging (*kasarira*) baik dalam kehidupan pengarang sebagai idiologinya, maupun dalam ekspresi estetisnya (karya

sastra). Hal ini antara lain tercermin pada berbagai karya sastra Jawa yang masih *nggondheli unggah-ungguh* dan *undha usuk basa* Jawa. Di samping itu, berbabagai pandangan hidup Jawa yang telah dikemas dalam berbagai bentuk pepatah-petitih atau *paribasan*, *bebasan*, *saloka* dan sebagainya, seperti *sapa salah bakal seleh* (siapa yang bersalah pasti akan kalah), *ngundhuh wohing pakarti* (menerima seperti apa yang diperbuatnya), *becik ketitik ala ketara* (yang baik atau yang tidak baik akan kelihatan), dan sebagainya masih banyak dipergunakan sebagai bingkai tema karya-karya sastra yang diciptakannya. Meskipun belum ada penelitian secara khusus, penulis yakin betul bahwa sastrawan yang masih mau mengekspresikan karyanya dengan bahasa Jawa, secara umum masih meyakini kebenaran nilai-nilai kejawaan. Oleh karena itu tidak berlebihan bila karya sastra yang dihasilkannya, disadari atau pun tidak merupakan sarana bagi penyampaian nilai-nilai budaya Jawa.

Di sisi lain, secara teoretis sastra dapat dipandang sebagai dokumen social budaya masyarakat tertentu. Swingewood (dalam Faruk, 1999: 4), misalnya, mengemukakan bahwa dalam pandangan sosiologi sastra, sastra bukanlah suatu cipta budaya yang otonom, tetapi merupakan karya yang keberadaannya berkaitan erat dengan sosial budaya masyarakat yang melingkupinya. Pemahaman karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang kebudayaan yang melatarbelakangi karya sastra (Teeuw, 1984: 100). Ratna (2007: 278), juga mengemukakan bahwa masyarakat sastra adalah masyarakat imajiner yang sesuai dengan hakikat karya sebagai rekaan. Masyarakat sastra erat kaitannya dengan penggambaran pada karya sastra itu sendiri, sebab masyarakat sastra merupakan rekaan dari masyarakat pada kenyataannya.

Menurut teori ini karya sastra sedikit atau banyak akan mengekspresikan kembali latar social budaya dari masyarakat yang menghasilkannya, termasuk segala pandangan hidup dan sikap kritis pengarangnya. Mengacu pada pendapat ini, maka sastra Jawa sedikit banyak, disadari atau pun tidak juga menjadi dokumen sosial budaya Jawa, yang dalam hal ini menyuarakan nilai-nilai budaya Jawa.

C. Sastra Jawa Modern sebagai Bentuk yang Representatif

Batasan sastra Jawa modern yang lebih umum dipakai adalah karya sastra Jawa yang menggunakan bahasa Jawa Baru. Mulainya penggunaan bahasa Jawa Baru, kiranya dapat disejajarkan dengan catatan Zoetmulder (1983: 25) tentang berakhirnya penggunaan bahasa Jawa Kuna dan Bahasa

Jawa Pertengahan, yakni akhir abad ke-17 yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan kerajaan di Blambangan dan mulai berkembangnya pengaruh Islam. Dengan demikian bila mengacu pada batasan ini, karya sastra Jawa Modern yang dimaksud agaknya terlalu luas, meskipun dalam berbagai isi dan ceritanya juga telah menyorotkan tema-tema budaya Jawa modern. Pada kesempatan ini, istilah sastra Jawa Modern yang dimaksud lebih dipersempit yakni menyangkut karya sastra Jawa mutakhir (meminjam istilah J.J. Ras, 1985), dan lebih khusus lagi mengacu pada karya sastra Jawa yang berisi cerita kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa setelah kemerdekaan Indonesia. Batasan ini semata-mata, secara purposive menekankan isi cerita yang lebih representative yang lebih mudah untuk dibandingkan dengan kehidupan riil pada masyarakat dewasa ini, bahkan mungkin dapat ditemukan dalam kehidupan modern akhir-akhir ini. Di samping itu karya sastra Jawa yang demikian ini diharapkan lebih dapat diciptakan lagi secara lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih memadai agar secara logika lebih mudah diterima oleh pembaca, lebih mudah diapresiasi dan kemungkinannya lebih praktis untuk diteladani. Karya-karya yang demikian ini antara lain banyak terdapat pada bentuk gancaran, yakni *cerkak*, novelette Jawa, novel Jawa modern, dan cerita bersambung Jawa; yang berbentuk puisi yakni geguritan; dan yang drama adalah sandiwara modern.

Bila ditinjau secara pragmatis, ada keunggulan masing-masing jenis tersebut (Widayat, 2011: 19-21). Jenis prosa atau *gancaran*, memiliki keunggulan-keunggulan komunikatif, antara lain: lugas dan jelas. Lugas, maksudnya secara umum lebih banyak menggunakan kosa kata sehari-hari sehingga lebih mudah untuk dicerna pembaca. Adapun jelas, maksudnya secara umum lebih banyak menggunakan struktur gramatikal sesuai dengan standar bahasa formal yang berlaku. Kedua sifat *gancaran* tersebut berimplikasi lebih lanjut pada sifat yang lebih komunikatif. Artinya, sangat memungkinkan bagi pembaca untuk memahami isinya dalam waktu yang relatif singkat. Pembaca mengerti dan memahami hanya dengan sekali baca.

Jenis puisi memiliki keunggulan-keunggulan estetis, yakni antara lain menekankan pemilihan diksi yang padat, bebas dan indah. Padat, artinya bahwa dalam satu kata puisi dapat menampung keluasan makna imajinatif sehingga menawarkan pemakaian yang relatif sangat dalam. Bebas, maksudnya tidak sangat terikat oleh kaidah-kaidah linguistik, seperti halnya kaidah gramatikal. Larik-larik puisi tidak harus berstruktur seperti kalimat formal, ada subyeknya ada predikatnya dan seterusnya. Indah, maksudnya

menekankan pentingnya segala unsur yang bernilai keagungan seni. Ketiga sifat puisi tersebut secara estetis membuatnya tidak kaku tidak membosankan dan kaya akan makna.

Jenis drama menekankan dialog dan lakuan yang mengarah pada konflik para pelakunya. Jenis ini tentu saja memiliki keunggulan aksi dramatik. Artinya, jenis drama lebih banyak menawarkan gerak laku dan pembicaraan efektif yang berisi alur cerita. Dengan demikian pengekspresianannya diaktualisasikan dalam pertunjukan.

Berdasarkan keunggulan ciri-ciri masing-masing jenis tersebut, jelaslah bahwa jenis prosa atau *gancaran*, yakni *cerkak*, cerbung Jawa dan novel Jawa, merupakan bentuk yang paling representatif untuk bacaan yang menyuarakan kehidupan keseharian masyarakat Jawa modern, meskipun juga tidak terlepas dari pandangan-pandangan tradisional, yang juga sering dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari secara riil dalam masyarakat Jawa dewasa ini. Cerkak, disamping banyak bercerita tentang kehidupan keseharian, sering kali juga menekankan kemasam simbolik. Cerkak-cerkak seperti *Matine Sura Topeng* karya Turiyo Ragilpiutra, misalnya, menceritakan secara simbolis saat-saat kematian Sura Topeng yang hampir saja ditolak penguburannya oleh penghuni kuburan Lemah Abang. Dalam hal ini cerita kematian Sura Topeng tampak sebagai simbolisme dari kematian presiden Suharto, yang ketika itu dinilai banyak berdosa kepada kelompok politik yang beratribut merah (Lemah Abang).

Cerkak Sirah Anyar kanggo Sungeb karya Sartono menceritakan kepala Sungeb yang sakit kanker dan menular ke bagian-bagian tubuh yang lain, bahkan ke orang lain. Walaupun kepala itu yang paling parah sakitnya, tetapi justru yang terasa sakit adalah anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh lainnya, yakni kaki, tangan, dan mata, sudah diganti, namun penyakitnya belum juga sembuh. Sungeb sendiri tidak mau dipersalahkan karena menderita penyakit menular itu. Ia cenderung menyalahkan lingkungannya, seperti berbagai makanan, yang telah membuatnya sakit. Ia merasa sebagai kurban dan menyalahkan orang lain. Atas anjuran dokter kepala Sungeb harus diganti. Namun Sungeb dianjurkan agar jangan merasa sebagai kurban rekayasa untuk menghapuskan jati diri dan kehormatannya. Akhirnya kepalanya harus diganti dengan kepala lain karena tidak mampu lagi menjalankan fungsinya. Cerita ini, dengan beberapa indikator lainnya, tampak juga sebagai simbolisme kelemahan Presiden Suharto (kepala yang sakit kanker) dan akhirnya kepala itu harus diganti.

Cerkak *Dhalang* karya Susmono Sandy Asmoro menceritakan tentang desa Andhong Waringin yang melaksanakan bersih desa dengan nanggap wayang kulit. Dalam pertunjukan semalam suntuk, terjadi beberapa kali pergantian dalang, karena alasan yang berbeda-beda. *Cerkak* yang realis ini secara simbolik tampak berhubungan dengan realita di Indonesia, yakni beberapa kali prosesi pergantian kepemimpinan nasional setelah lengsernya Presiden Soeharto. Sebelumnya masyarakat telah menolak dalang Sutapa Pujo Hartono, dalang senior yang dianggap merusak sejarah dan pakem wayang. Kiranya tidak berlebihan bila dalang Sutapa Pujo Hartono itu merupakan simbol dari Presiden Soeharto yang dianggap telah merusak moral bangsa dengan KKN dan menyelewengkan sejarah bangsa. Bila demikian halnya maka nama Hartono dalam Sutapa Pujo Hartono memang sengaja dimiripkan dengan nama Suharto. Kemudian ditampilkan dalang Wahyu, yang ternyata mirip dalang Sutapa, serta banyak menggunakan wayang milik Sutapa. Baehaqi, (ed. 1999: 93) menuliskan bahwa Habibie mengekor mantan Presiden Soeharto, yakni menggunakan jabatan pemerintahan untuk kepentingan pribadi. Dalang Wahyu digantikan dalang Hadi yang ternyata banyak melakukan salah ucapan dan membingungkan. Dalang Hadi tersebut dapat ditafsirkan sebagai simbolisme dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sering melontarkan ucapan-ucapan kontroversial dan membingungkan. Sri Edi Swasono (2001: 360) juga mencatat bahwa dengan Gus Dur sebagai Presiden, dunia politik menjadi penuh teka-teki dan kiasan, *puzzles* dan *riddles*. Yang terakhir dalang Hadi digantikan oleh pesinden Rani. Dalang Rani walaupun hanya mantan pesinden tetapi ia keturunan dalang dan berpengalaman. Kiranya pesinden Rani yang keturunan dalang ini dapat dimaknai sebagai simbolisme dari Presiden perempuan, yakni Megawati, yang merupakan keturunan presiden Soekarno, sehingga masalah pemerintahan bukanlah hal yang asing baginya.

Meskipun cerkak-cerkak tersebut bersifat simbolik, namun pada kenyataannya berisi pesan-pesan yang diambil dari cerita dalam realitas yang notabene mudah untuk ditangkap dan direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari dunia Jawa modern ini. Disamping keadaan tersebut, bentuk cerkak merupakan bentuk karya sastra Jawa yang sangat produktif setelah geguritan, karena pada hamper setiap terbitan majalah berbahasa Jawa selalu dimuat bentuk cerkak ini.

Bentuk yang juga hamper selalu ada dalam majalah berbahasa Jawa adalah cerita bersambung Jawa. Bentuk ini dari segi isinya sesungguhnya tidak sangat jauh berbeda dengan bentuk novel, namun terutama pada

bagian alur dan pemenggalan setiap terbitannya, bentuk cerbung ini tampak berbeda dengan novel, karena cerbung menekankan *suspense* atau *foreshadowing* pada bagian akhir setiap pemuatan, agar pembaca merasa ketagihan untuk membaca sambungan pada terbitan berikutnya. Dari sisi isi ceritanya, seperti juga novel Jawa, cerbung Jawa juga banyak bercerita mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa modern.

Novel-novel seperti *Sirah* karya AY Suharyono, misalnya, menyetengahkan tema pemilihan lurah dengan politik uang, dengan politik seksual (masalah era modern ini) yang juga diwarnai masalah perdukunan tentang pencurian kepala mayat (tradisional). Novel *Kinanti* karya Margareth Widhy Pratiwi, secara intensif lebih kental menyetengahkan budaya masyarakat kota dengan segala gebyarnya, yakni menyangkut pelacuran, pernikahan priyayi dengan mantan pelacur, tradisi kengan untuk berjudi bagi para ibu-ibu kelas atas, dilengkapi dengan kengan mereka untuk hubungan seksual, dan juga penggunaan miras dan bahkan narkoba. Novel *Hera-heru* karya Agus Suprihono, menyetengahkan tema tawuran pemuda antar desa dengan berbagai fitnah (sifat dan sikap *srei*, *drengki*, *jail*, *methakil*) yang dihembuskan, dan budaya hedonisme dari asing sebagai masalah yang akhir-akhir ini juga marak terjadi di negeri ini.

D. Kebijakan yang Diharapkan dari Pemerintah

Dalam hubungannya dengan masyarakat modern dewasa ini, khususnya bagi generasi penerus, penulis beserta Suwardi Endraswara dan Eko Santosa bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Propinsi DIY (2008: 97) telah menuliskan berbagai pedoman pelestarian dan pengembangan Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, antara lain dalam hubungannya dengan globalisasi, yakni bahwa untuk mengimbangi masuknya budaya-budaya asing ke wilayah nusantara, khususnya di Jawa, pemerintah harus mengambil keputusan kebijakan-kebijakan populer yang tidak merugikan bagi bangsa ini. Otonomi daerah mesti dimaknai sebagai pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya daerah yang mampu menjadi filter-filter terhadap masuknya budaya asing yang tidak sesuai dan pada gilirannya akan menjadi ikon jati diri bangsa Indonesia. Kekosongan-kekosongan dan kelonggaran-kelonggaran yang ada pada budaya Indonesia semestinya diisi oleh budaya-budaya daerah (baca: Jawa), sehingga menjadi budaya yang kental dengan akar budaya sendiri.

Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah di Jateng, DIY dan Jatim, beserta DPRD-nya, mesti harus proaktif mengulurkan tangan

dengan segala kebijakan hingga payung hukumnya, sehingga alasan-alasan praktis yang hanya bersifat sementara dan tidak secara mendasar berpijak pada nilai-nilai budaya daerah dapat ditepis. Di sisi lain, payung hukum akan mampu menggerakkan jajaran-jajaran di bawahnya secara sistematis dengan segala upaya dan dana yang secara resmi dialokasikannya.

Tidak menutup mata bahwa berbagai alasan sesaat telah membuat terganjalnya pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya Jawa, antara lain dari sisi pembelajaran formal di sekolah, bahasa dan sastra Jawa tidak diuji sebagai materi yang masuk ijasah, tidak ada waktu atau alokasi jam pelajaran yang secara resmi memadai (kurikulum wajib untuk setiap kelas), atau bahkan pembelajaran bahasa dan sastra daerah tidak mampu ikut menjanjikan masa depannya siswa, karena tidak terintegrasi dengan system di lapangan kerja. Dari sisi non formal, atau lembaga-lembaga formal terkait, tidak ada yang mampu mengagendakan segala aktivitas pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya Jawa, dengan alasan tidak adanya alokasi dana untuk itu, dan sebagainya berbagai alasan yang perlu sekali ditepis secara sistematis dan strategis. Di sisi informal dan non formal, sering juga muncul alasan bahwa bahasa, sastra dan budaya Jawa tidak pernah dipakai sebagai syarat ujian masuk pegawai di ketiga Propinsi tersebut. Juga perlu disayangkan bila instansi-instansi pemegang keputusan dan pemangku kebudayaan, yakni terutama Gubernur Kepala Daerah sangat pasif dan dengan alasan masyarakat sudah tidak menghendakinya, lalu tidak segera menyikapi mengambil kebijakan strategis pada pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya Jawa.

Telah diketahui bahwa setiap tahun rata-rata sejumlah bahasa daerah menjadi punah atau mati. Dalam suatu konferensi di Paris tahun 1999, UNESCO mencatat ada enam hingga sepuluh bahasa etnis tertentu hilang setiap tahunnya. Sebagai bangsa yang besar atau setidaknya hingga sekarang masih tampak berbagai bukti keaungan sejarah budayanya, bangsa Jawa semestinya tidak menyerah pada realitas yang akan terjadi, tetapi harus mengusahakan apa yang semestinya harus terjadi. Hal ini memang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas semua elemen masyarakat, baik secara formal, nonformal maupun informal. Namun demikian, pada kenyataannya masyarakat Jawa selalu memerlukan *pangeran*, yakni *pa + ng + her + an*, yang dalam tataran batiniah adalah Tuhan dan pada tataran lahiriah adalah penguasa daerah. *Pangeran* adalah tempat *pangengeran* yakni tempat setiap orang dapat berlindung dalam

kehidupannya atau tempat pengayom. Dalam tataran bahasa dan sastra Jawa, pengayom di sini adalah pengambil kebijakan yang mampu memberikan payung hukum. Penulis yakin betul bahwa dalam hubungannya dengan pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya daerah, saat ini tidak saatnya yang tepat untuk benar-benar hanya menyerahkan pada realitas di lapangan. Payung hukum diperlukan dalam rangka menarik keluar dari arus deras menuju kepunahan, seperti yang dicatat UNESCO di atas. Jadi jelaslah bahwa pemerintah perlu secara sungguh-sungguh (*gumregut*) mengupayakan strategi pelestarian bahasa, sastra dan budaya daerah, yakni secara formal menjadikan pelajaran Bahasa Jawa sebagai pelajaran wajib lulus dan masuk dalam ijazah; secara non formal dan informal, misalnya bahasa, sastra dan budaya Jawa sebagai materi tes syarat masuk menjadi pegawai negeri di Propinsi Jateng, DIY dan Jatim, bahasa Jawa sebagai bahasa resmi dalam berbagai rapat, dan sebagainya.

E. Harapan kepada Pakar Sastra dan Sastrawan

Dalam kondisi yang sejak lama dikhawatirkan ini, kiranya karya-karya sastra Jawa perlu dikaji lebih seksama dan lebih gigih disosialisasikan, terutama pada tema dan amanat karya-karya yang memang mengangkat permasalahan-permasalahan yang sedang marak belakangan ini, khususnya yang menyangkut permasalahan generasi muda, yakni mulai dari permasalahan-permasalahan keseharian antara lain hubungan seks bebas, masalah miras dan narkoba, tawuran antar kelompok karena berbagai alasan, hingga masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni antara lain masalah politik uang, korupsi, kesewenangan-penguasaan penguasa, demonstrasi dengan tindakan anarkis, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat terangkum dengan pertanggung jawaban pada sebuah etika-etiket *unggah-ungguh, tata krama, sopan-santun* dan sebagainya.

Bagi para pakar pemerhati sastra, pengajar dan pendidik, kedepan mesti harus lebih ikut serta menyuarakan dan mensosialisasikan karya-karya sastra, terutama karya-karya yang lebih representative menyuarakan pesan moral bagi generasi muda, generasi penerus bangsa. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan bersastra, baik melalui pembelajaran sastra di sekolah-sekolah (formal), tulisan-tulisan di media massa, atau berbagai even berseni sastra di tengah-tengah masyarakat, seperti pada even HUT kemerdekaan RI, hari Kartini, hari jadi kota tertentu, even-even budaya tertentu, atau bahkan bila perlu memang diadakan. Saat ini yang sering diadakan adalah membaca puisi (geguritan),

dan berdrama terutama drama tradisional seperti kethoprak dan wayang kulit. Bentuk ini mungkin kurang lengkap dan perlu lebih dicoba diterapkan untuk membaca bagian-bagian tertentu dari cerkak atau novel Jawa dan bentuk drama-drama pendek Jawa yang bertema kehidupan modern ini, dengan segala upaya dan daya tariknya agar lebih sampai (sekali lagi lebih sampai atau lebih banyak diterimakan) kepada masyarakat generasi muda.

Bagi para sastrawan, diseyogyakan lebih banyak mencipta dan menulis karya-karya yang bertema atau beramanat kekinian dan kontekstual atau yang lebih representative sehingga dapat lebih berdaya guna pada keberterimaan masyarakat. Setiap sastrawan tentu memiliki kiat-kiatnya masing-masing untuk membuat karya-karyanya lebih menarik, dan yang mesti harus ditekankan adalah bagaimana suatu karya dapat mengena dan menarik pembaca dari orang-perorang, generasi muda, hingga pada masyarakat Jawa secara umum.

Pada kenyataannya tema-tema yang ada pada karya sastra Jawa modern, pada umumnya terbatas pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sedang masyarakat kelas atas jarang sekali digarap. Kenyataan ini dari sisi tertentu menjdikan gap, jurang pemisah, antara isu-isu riil yang terjadi di masyarakat dengan bidang garapan sastra. Masalah penetapan Gubernur Kepala Daerah di DIY, masalah-masalah korupsi dan politik di tingkat atas, dari pemilihan bupati hingga di tingkat pusat, tidak pernah tersentuh. Sementara, pembicaraan riil di masyarakat secara umum tidak terlepas dari isu-isu tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa sastra harus mengejar isu-isu sesaat, namun pada kenyataannya politik tingkat atas telah menjadi komoditas yang lebih menarik masyarakat, sehingga tema-tema tersebut boleh jadi lebih mampu menggerakkan semaraknya bersastra Jawa. Disamping tema-tema realitas tersebut, masih ada tema-tema global yang dapat dijadikan lahan penting, antara lain masalah-masalah bioetik, seperti euthanasia, menyangkut bolehkah dilakukan? Siapa yang berhak menentukan? Dan sebagainya. Masalah aborsi, kapan dan bagaimana diperbolehkan atau tidaknya. Masalah kebutuhan seksual pada pasutri yang salah satunya berada di penjara, adakah bagi yang tidak dipidana itu berhak menuntut ketika suaminya atau isterinya itu di penjara? Dan masih banyak lagi yang menjanjikan untuk dijadikan bidang garapan sastra sebagai penyampaian amanat yang merupakan hasil filter pemikiran menurut masyarakat Jawa, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini yang penting untuk direnungkan adalah sastra Jawa harus diangkat dengan berbagai cara dan sudut pandangnya. Adapun tema-tema dan amanat yang lebih dapat diterima oleh

masyarakat modern jelas menjadi bidang garapan yang lebih menjanjikan.

E. Simpulan

Pada dasarnya karya sastra Jawa tidak akan maju bila tanpa penanganan secara menyeluruh bersama dengan kemajuan bahasa dan budayanya. Penanganan yang lebih sinergis antara berbagai pihak jelas menjadi kuncinya. Namun demikian, salah satu kunci gerbangnya, hingga saat ini, yakni masih diperlukannya payung hukum dari beberapa pihak yang memegang otoritas kebijakan, dalam hal ini Gubernur dan DPRD. Kedua lembaga ini seakan menjadi bempes yang harus selalu di depan menarik jajaran-jajaran di bawahnya agar bahasa, sastra dan budaya Jawa akan tetap lestari dengan berbagai perkembangan yang terarah.

Karya sastra Jawa modern yang hanya sebagian dari unsur-unsur budaya Jawa diharapkan juga dapat ikut serta menyemarakkan secara lebih signifikan, dengan memperkaya bidang-bidang garapannya dan memperlancar serta memperluas lahan sosialisasinya. Sastra Jawa harus juga mampu menangkap *sangkrah-sangkrah* pada derasnya arus globalisasi, untuk digarap dan direproduksi menjadi kemasan-kemasan dan kapsul-kapsul nilai-nilai budaya Jawa yang menyehatkan dan menyembuhkan penyakit masyarakat modern ini.

Daftar Bacaan

- ◆ Endraswara, Suwardi. Dkk., 2008. Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Jawa. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Propinsi DIY
- ◆ _____ . Dkk. 2009. Pemberdayaan Bahasa Jawa di Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Propinsi DIY
- ◆ Faruk. 1999. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- ◆ Pratiwi, Margareth Widhy. 2001. Kinanti. Yogyakarta: Taman Budaya Propinsi DIY
- ◆ Ratna, Nyoman Kutha. 2007. Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ◆ Suharyono. AY. 2001. Sirah. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- ◆ Suratno, Pardi. Dkk. Ed. 2001. Bandha Pustaka: Antologi Cerita Pendek Jawa. Yogyakarta: Radita Buana
- ◆ Teeuw, A.. 1984. Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya
- ◆ Taman Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1999, Liang Tembang Prapatan, Antologi Cerkak

- ◆ Wellek dan Warren., 1993, Teori Kesusastaan, Jakarta: Gramedia
- ◆ Widayat, Afendy. 2011. Teori Sastra Jawa. Yogyakarta: Kanwa Publisher